

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN DI SMP NEGERI 1
TALIABU BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mengikuti Ujian Seminar Hasil Penelitian
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh:
HUSNITA USMAN
NIM: 201810240211011**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN DI SMP NEGERI 1
TALIABU BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mengikuti Ujian Seminar Hasil Penelitian
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun Oleh:
HUSNITA USMAN
NIM: 201810240211011**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN
DI SMP NEGERI 1 TALIABU BARAT DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKANN**

Diajukan oleh:

HUSNITA USMAN
201810240211011

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Kamis / 30 Januari 2020**

Pembimbing Utama


Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd

Direktor
Program Pascasarjana

Pembimbing Pendamping


Dr. Estu Widodo, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan



Dr. Abdul In'am, Ph.D



Dr. Agus Tinus, M.Pd

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HUSNITA USMAN

201810240211011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Kamis / 30 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI



Ketua	:	Dr. Dwi Priyo Utomo, MPd
Sekretaris	:	Dr. Etna Widodo, M.Hum.
Penguji I	:	Dr. Moh. Mahfud Effendi
Penguji II	:	Dr. M. Satrio

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HUSNITA USMAN**

NIM : **201810240211011**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN DI SMP NEGERI 1 TALIABU BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Februari 2020

Yang menyatakan,


HUSNITA USMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN DI SMP NEGERI 1 TALIABU BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”, dapat terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari arahan dan bantuan berbagai pihak serta bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh pembimbing dan para Dosen. Oleh karena itu dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Agus Tinus, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan.
3. Bapak Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan kesempatan, waktu, arahan dan pengetahuan dalam memberikan bimbingan Tesis sampai pada tahap akhir.
4. Bapak Dr. Estu Widodo, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kesempatan, waktu, arahan dan pengetahuan dalam memberikan bimbingan Tesis sampai pada tahap akhir.
5. Kedua orang tua saya H. La Hudia Usman, S.Pd dan Hj. Wa Tanda Tomia, S.Pd yang telah banyak memberikan dukungan, arahan serta do'a nya dalam menyelesaikan Tesis hingga tahap terakhir.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menulis menjadi mahasiswa dan seluruh kawan-kawan yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna. Sehingga saran, kritik dan masukan sangat diharapkan untuk memperbaiki Tesis ini. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pembuatan Tesis ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 21 Desember 2019

Penulis



ABSTRAK

Usman, Husnita. 2019. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RUJUKAN DI SMP NEGERI 1 TALIABU BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN*. Tesis. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: **I) Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd, (NIND 0026026201), II) Dr. Estu Widodo, M.Hum, (NIND 0020056801)** husnitausman9@gmail.com

Penelitian implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat dan juga untuk mengetahui bagaimana peningkatan standar pendidik dan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah rujukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles and Huberman yaitu ada empat tahap dalam analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat telah dijalankan selama 2 tahun. Proses implementasi sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat yaitu adanya penilaian khusus melalui pembagian kuesioner dan dilaksanakan selama beberapa bulan dan akhirnya ditetapkan sebagai sekolah rujukan karena syarat utamanya yaitu telah terakreditasi A. 2). Dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat masalah yang dihadapi yaitu kualitas pendidik yang ada. Untuk meningkatkan kualitas pendidik maka sekolah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik di SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan yaitu, workshop, MGMP, dll. Hasil dari pelatihan-pelatihan maupun workshop dan sebagainya yaitu: 3). Selain kendala pada kualitas pendidik, terdapat kendala lain yaitu penyediaan sarana dan prasarana. SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai sekolah rujukan seharusnya mempunyai fasilitas-fasilitas yang memadai yang dapat menunjang proses pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang menarik bagi siswa. Untuk itu, sekolah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti penyediaan taman baca agar siswa dapat membaca dengan nyaman, penyediaan alat-alat bantu dalam proses pembelajaran agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: sekolah rujukan, peningkatan pendidik, peningkatan sarana dan prasarana

ABSTRACT

Usman, Husnita. 2019. *IMPLEMENTATION OF REFLECTED SCHOOL POLICY IN SMP NEGERI 1 WEST TALIABU IN IMPROVING EDUCATION QUALITY*. Thesis. Masters in Education Policy and Development. University of Muhammadiyah Malang. Advisor: **I) Dr. Dwi Priyo Utomo, M.Pd, (NIND 0026026201). II) Dr. Estu Widodo, M.Hum, (NIND 0020056801)** husnitausman9@gmail.com

This research on the implementation of referral school policy in SMP Negeri 1 Taliabu Barat aims to find out the implementation of the reference school policy at SMP Negeri 1 Taliabu Barat and also to find out how to improve the standards of educators and facilities and infrastructure to improve the quality of education at SMP Negeri 1 Taliabu Barat. This study uses a descriptive qualitative approach carried out at SMP Negeri 1 Taliabu Barat as a school that has been designated as a reference school. Data collection techniques used in research are interviews, observation and study documentation. Data analysis techniques using the theory of Miles and Huberman, there are four stages in data analysis consisting of data collection, data presentation, data condensation and drawing conclusions or data verification. The results showed that: 1). The implementation of the referral school policy at SMP Negeri 1 Taliabu Barat has been running for 2 years and is in accordance with the Guidance and Development of Referral Schools in Junior High Schools issued by the Ministry of Education and Culture (2016). The process of implementing a referral school in SMP Negeri 1 Taliabu Barat is the existence of a special assessment through the distribution of questionnaires and carried out for several months and finally determined as a reference school because the main requirements are accredited A. 2). In implementing the referral school policy in SMP Negeri 1 Taliabu Barat the problem faced was the quality of existing educators. To improve the quality of educators, schools are working with the government to conduct trainings in order to improve the quality and professionalism of educators in SMP Negeri 1 Taliabu Barat. For trainings that are held, namely, workshops, MGMP, etc. The results of the training and workshops and so on are: 3). In addition to constraints on the quality of educators, there are other obstacles, namely the provision of facilities and infrastructure. SMP Negeri 1 Taliabu Barat as a reference school should have adequate facilities that can support the learning process in order to create interesting learning for students. For this reason, the school provides necessary facilities such as the provision of a reading garden so that students can read comfortably, providing tools in the learning process so that students can understand learning effectively and efficiently.

Keywords: referral schools, improvement of educators, improvement of facilities and infrastructure.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Susunan Dewan Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
1. Pendahuluan	1
2. Kajian Teori	5
2.1 Kebijakan.....	5
2.1.1 Pengertian Kebijakan	5
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	5
2.2 Model Implementasi dan Fungsi Monitoring Kebijakan.....	6
2.3 Sekolah Rujukan.....	7
2.3.1 Pengertian Sekolah Rujukan	7
2.3.2 Tujuan Sekolah Rujukan	7
2.3.3 Indikator Sekolah Rujukan.....	8
2.3.4 Mekanisme Penetapan Sekolah Rujukan	8
2.3.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan.....	11
2.4 Standar Nasional Pendidikan.....	11
2.4.1 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12
2.4.2 Standar Sarana dan Prasarana.....	12
2.5 Mutu Pendidikan.....	14
3. Metode Penelitian	15
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.3 Instrumen Penelitian.....	16
3.4 Data dan Sumber Data.....	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	16
3.6 Teknik Analisis Data	17
3.7 Keabsahan Data	17
4. Hasil	17
5. Pembahasan.....	23
6. Simpulan dan Saran	25
Daftar Rujukan	26
Lampiran	

1. Pendahuluan

Menurut Soedijarto pendidikan dipandang bermutu diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkeperibadian (Yudi, 2012). Selain itu pendidikan juga diciptakan untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Artinya, jika suatu bangsa ingin meningkatkan kualitas SDM maka perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu kondisi dan proses serta hasil pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya dan masyarakat (Leonard, 2015). Selain itu menurut Higley, Heesacker, & Brenneman (2019) untuk meningkatkan mutu pendidikan di US terdapat lima faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu: *social support, time perception, enjoyment of the process, accessibility to materials and training and the motivation for desired activities*.

Pendidikan yang baik perlu membahas tentang faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas serta lingkungan. Jika faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan optimal maka pendidikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik juga (Kurniawan, 2017).

Tetapi, di Indonesia masih ditemukan bahwa mutu pendidikan dasar dan menengah belum seperti yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan, n.d. bahwa hasil penataan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di daerah masing-masing. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, metode pembelajaran, alat bantu belajar dan manajemen sekolah. Belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terbagi menjadi

pulau-pulau dan terpisah satu dengan yang lain. Hal ini juga bisa menjadi kendala bagi pemerintah dalam pemberian fasilitas pendidikan.

Permasalahan di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ekawati (2017) bahwa kualitas pendidik di Indonesia masih jauh berbeda dari negara-negara lain dan hal menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan yang berkualitas juga masih belum di nikmati di daerah-daerah terpencil, sementara itu pendidikan yang berkualitas bisa didapatkan dan di nikmati di daerah-daerah yang mudah di jangkau oleh fasilitas-fasilitas dan faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri.

Dengan adanya permasalahan seperti di atas, maka Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah membuat kebijakan yang mana setiap kabupaten/kota harus memiliki sekolah rujukan. Kebijakan ini terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 267/C/KL/2015 Tanggal 15 Juni 2015. Pemilihan dan penyaringan sekolah rujukan dilaksanakan oleh tim yang di bentuk dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerataan mutu pendidikan di Indonesia sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan sekolah yang telah memenuhi syarat dapat menjadi rujukan bagi sekolah yang ada di sekitarnya (Ekawati, 2017).

Menurut Kemendikbud (2016) sekolah rujukan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah. Adanya sekolah rujukan diharapkan dapat menjadi sekolah panutan atau contoh untuk sekolah lain yang ada di sekitarnya dalam menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri untuk memenuhi atau melebihi standar nasional pendidikan (SNP) dan mempunyai prestasi yang unggul pada bidang akademik maupun non akademik. Sekolah rujukan yaitu sekolah yang telah memiliki akreditasi A, memajukan ekosistem pendidikan, memiliki lingkungan dan iklim sekolah yang nyaman serta menerapkan pendidikan karakter yang dapat dijadikan panutan atau contoh untuk sekolah yang ada di sekitarnya.

Tujuan dibentuknya sekolah rujukan adalah untuk mempercepat pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP serta

menciptakan lingkungan dan iklim sekolah yang nyaman pada setiap satuan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sekolah rujukan ini diharapkan mampu membantu pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan melalui kerjasama dan adanya pengimbasan dari sekolah rujukan ke sekolah di sekitarnya. Pihak sekolah yang ikut dalam melakukan pengimbasan yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Kesiswaan. Sekolah imbas yang dimaksud adalah sekolah-sekolah yang belum memenuhi SNP dan diharapkan dengan adanya sekolah rujukan ini bisa membantu sekolah-sekolah tersebut untuk memenuhi SNP agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain (Kemendikbud, 2016).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka setiap jenjang pendidikan harus memenuhi 8 SNP yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013, 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan tolak ukur dalam pendidikan di Indonesia. Dalam SNP terdapat standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Untuk meratakan pendidikan di daerah Kabupaten Pulau Taliabu, SMP Negeri 1 Taliabu Barat ditunjuk sebagai sekolah rujukan karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1686/D3/KP/2016 Tentang Penetapan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016. SMP Negeri 1 Taliabu Barat sudah 2 tahun menjadi sekolah rujukan. Sebagai sekolah rujukan SMP Negeri 1 Taliabu Barat mempunyai 5 sekolah imbas yang ada disekitarnya yaitu, SMP Negeri 2 Taliabu Barat, SMP Negeri 5 Taliabu Barat, SMP Negeri 6 Taliabu Barat, SMP Negeri 1 Lede dan SMP Negeri 1 Todoli.

Namun dalam pelaksanaan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini masih ditemukan kendala dari segi kualitas pendidik dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sesuai dengan isi dari Kebijakan Sekolah Rujukan bahwa sekolah yang telah dipilih sebagai sekolah rujukan adalah sekolah yang telah memenuhi 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang didalamnya terdapat standar pendidik dan

tenaga kependidikan juga standar sarana dan prasarana. SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai sekolah rujukan sudah memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, namun harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia adalah kualitas dari pendidiknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wayan & Purna (2017) bahwa pendidik mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar karena pada proses ini pendidik harus menjalankan dua tugas sekaligus yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Dengan demikian secara tidak langsung pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Begitu besarnya peran pendidik dalam mengajar dan mendidik, maka dapat diakui bahwa kemajuan pendidikan sebagian besar bergantung pada kemampuan pendidiknya. Pendidikan di Indonesia akan maju jika memiliki kualitas pendidik yang baik.

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarananya. SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai sekolah rujukan telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan belajar mengajar juga kebutuhan siswa. Namun masih terdapat sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh sekolah agar dapat menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah dan dapat mempertahankan status sekolah sebagai sekolah rujukan.

Hal ini sesuai dengan isi kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud (2016) bahwa berlangsungnya pendidikan yang mendukung dapat tercipta apabila setiap bagian dari pendidikan tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, antara setiap bagian dari pendidikan itu harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Indikator dari setiap bagian tersebut adalah: (a) Terdapat aktivitas sekolah yang menyenangkan, ramah, tenang dan nyaman, salah satunya yaitu terdapat di sediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di luar kelas yang disesuaikan dengan teknologi pada zamannya. (b) Terdapat fasilitas yang memadai untuk siswa agar dapat menyalurkan ekspresi, kreasi dan eksposisi mereka.

Keberhasilan pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang saling berhubungan dan berpengaruh salah satunya yaitu sarana dan prasarana. sarana dan prasarana pendidikan yang terjamin dan lengkap maka dapat menciptakan

proses pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM). Kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan optimal jika didukung dengan ketersediaan sarana dan prasana yang baik, sarana dan prasarana tersebut seperti alat bantu belajar, laboratorium, lapangan, taman baca dan lain sebagainya (Kurniawan, 2017).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat”, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat? (2) Bagaimana peningkatan standar pendidik di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai Sekolah Rujukan? (3) Bagaimana peningkatan standar sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai Sekolah Rujukan?

2. Kajian Teori

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Rusdiana (2015:32) kebijakan adalah suatu rangkaian konsep yang menjadi dasar dari perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dari pemerintah atau sebuah organisasi dalam mencapai sasaran yang ditentukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ramdhani (2017) bahwa kebijakan merupakan susunan rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang disusun oleh para pemangku kebijakan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu konsep dasar yang didalamnya terdapat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, program-program, keputusan serta aturan-aturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin, 2015) yaitu sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan.

Sabatier & Mazmanian (1980) menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang

namun ada juga yang berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari pemerintah. Umumnya keputusan itu mengidentifikasi masalah, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk menjalankan proses implementasinya.

Sementara itu, menurut Howlet & Ramesh (1995) dalam buku Leo Agustino, Ph.D menjelaskan implementasi kebijakan merupakan proses dimana program atau kebijakan dilakukan, hal ini merupakan tujuan dari rencana ke dalam praktis.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menentukan tindakan agar tujuan dari kebijakan dapat diterapkan sebagai hasil dari suatu keputusan. Suatu kebijakan dapat diimplementasikan jika sudah memiliki tujuan dan sasaran, termasuk program dan juga dana yang dibuthkan telah tersedia seusai dengan yang telah ditetapkan (M. Hasbullah, 2015:94).

2.1.3 Model Implementasi Dan Fungsi Monitoring Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) (Nasrullah, 2015) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Model ini menunjukkan hubungan antar variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja dalam kebijakan, yaitu: (a) Ukuran dan tujuan kebijakan. (b) Sumber daya. (c) Karakteristik organisasi pelaksana. (d) Sikap para pelaksana. (e) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Dunn (2003) monitoring merupakan suatu prosedur dalam analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari implementasi suatu kebijakan. Monitoring merupakan cara untuk membuat pernyataan dengan menjelaskan tentang tindakan kebijakan di masa lalu maupun sekarang. Jadi, monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Serta dalam teori Dunn (2003) ada empat fungsi monitoring untuk melihat apakah implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Fungsi monitoring dalam implementasi kebijakan yaitu: (a) Fungsi ketaatan (*compliance*). (b) Fungsi pemeriksaan (*auditing*). (c) Fungsi laporan (*accounting*). (d) Fungsi penjelasan (*explanation*).

2.2 Sekolah Rujukan

2.2.1 Pengertian Sekolah Rujukan

Sekolah rujukan yaitu sekolah yang telah memiliki akreditasi A, memajukan ekosistem pendidikan, memiliki lingkungan dan iklim sekolah yang nyaman serta menerapkan pendidikan karakter yang dapat dijadikan panutan atau contoh untuk sekolah yang ada di sekitarnya (Kemendikbud, 2016).

Pengembangan sekolah rujukan didasari pada peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Seuruh sekolah diharapkan memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP). Dalam implementasinya, upaya untuk memenuhi SNP di seluruh sekolah bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan secara instan. Upaya pemerintah untuk membina sekolah-sekolah agar dapat mencapai SNP yang telah ditetapkan sudah dilakukan sejak tahun 2003, namun belum juga mencapai target tersebut (Kemendikbud, 2016).

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dan juga pengimbasan yang dilakukan ke sekolah yang ada disekitarnya. Dengan demikian sekolah rujukan harus berbagi keunggulan yang mereka miliki kepada sekolah yang menjadi target imbas (Kemendikbud, 2016).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah rujukan adalah sekolah yang telah memenuhi 8 SNP dan mempunyai kemampuan untuk mengimbasan kepada sekolah disekitarnya dengan tujuan meningkatkan dan menyamaratakan mutu pendidikan di Indonesia.

2.2.2 Tujuan Sekolah Rujukan

Tujuan sekolah rujukan adalah membantu sekolah yang ada disekitarnya dalam memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan. Secara lebih rinci ada 12 tujuan sekolah rujukan, yaitu: 1). Membantu sekolah untuk memenuhi SNP; 2). Membantu sekolah dalam mempertahankan SNP yang telah dicapai; 3). Meningkatkan mutu pendidikan; 4). Mempercepat dan juga meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia; 5). Menciptakan sekolah yang mampu mengembangkan dan menerapkan kerjasama dengan satuan pendidikan lainnya; 6). Membantu mengembangkan ekosistem pendidikan; 7). Menjadikan sekolah sebagai

tempat yang unggul yang berdasarkan pada SNP; 8). Menjadikan sekolah untuk mampu mengembangkan dan menerapkan serta menciptakan budaya mutu termasuk budaya literasi sekolah; 9). Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan menerapkan anti bullying; 10). Menjadikan sekolah mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan karakter; 11). Menjadikan sekolah sebagai model yang baik dan dapat diikuti untuk sekolah lain; 12). Sebagai pusat pembelajaran yang efektif dan mampu mengimbaskan kepada sekolah disekitarnya. (Kemendikbud, 2016)

2.2.3 Indikator Sekolah Rujukan

Dalam sekolah rujukan terdapat 6 indikator, yaitu: 1). Terakreditasi A; 2). Memiliki ekosistem pendidikan yang mendukung; 3). Memiliki lingkungan dan iklim pendidikan yang nyaman; 4). Menyelenggarakan program pendidikan karakter; 5). Sebagai titik pusat keunggulan; 6). Memiliki tempat yang strategis, mudah dijangkau dan aman (Kemendikbud, 2016).

2.2.4 Mekanisme Penetapan Sekolah Rujukan

Sesuai dengan yang sudah tertera di dalam buku Panduan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Rujukan Pada Sekolah Menengah Pertama (Kemendikbud, 2016) ada beberapa proses untuk menetapkan sekolah sebagai sekolah rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan

Ketentuan untuk menjadi calon sekolah rujukan dalam satu kabupaten/kota antara lain adalah: a). Sekolah negeri atau swasta yang memiliki izin operasional dan terdaftar di data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). b). Diutamakan yang sudah berakreditasi A. c). Berada di tempat yang strategis, mudah dijangkau dan aman.

2. Standar Sekolah Rujukan

Standar menjadi sekolah rujukan adalah sebagai berikut:

- a. Mampu untuk mengembangkan ekosistem yang mendukung, yaitu: 1). Menyediakan ruang terbuka yang nyaman; 2). Menyelenggarakan silaturahmi antar warga sekolah; 3). Menyediakan fasilitas yang telah memenuhi standar; 4). Menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kreatifitas siswa; 5). Adanya keterlibatan seluruh komponen sekolah, orang tua dan juga dunia usaha dan

- industri untuk mendukung program sekolah; 6). Adanya RKS/RKAS yang di dapatkan dari hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS); 7). Pendidik dan tenaga kependidikan menerapkan aktivitas untuk memahami kemampuan siswa; 8). Pendidik dan tenaga kependidikan menerapkan kegiatan yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kreativitas dan potensi yang di miliki; 9). Adanya kegiatan yang mendukung organisasi untuk ikut serta dalam bidang pendidikan atau lainnya; 10). Adanya partisipasi dari lembaga pendidikan lainnya; 11). Adanya pengimbasan SNP yang dilakukan ke sekolah di sekitarnya.
- b.** Mampu untuk memajukan budaya mutu, antar lain: 1). Adanya ekstrakurikuler; 2). Adanya pengayaan dan remedial; 3). Menyelenggarakan lomba-lomba dalam bidang akademik dan non-akademik; 4). Adanya organisasi-organisasi kesiswaan, seperti: organisasi siswa intra sekolah (OSIS), kader kesehatan remaja (KKR), palang merah remaja (PMR), dll; 5). Menyediakan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengembangan mutu; 6). Menetapkan agar seluruh siswa bergabung dalam organisasi perpustakaan (minimal perpustakaan sekolah); 7). Membentuk kebiasaan belajar; 8). Membentuk kebiasaan siswa dalam bekerja sama; 9). Membentuk karakter kewirausahaan.
- c.** Menjalankan program pendidikan karakter, antara lain: 1). Guru melakukan suatu pembiasaan kecil yaitu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum dan setelah pembelajaran; 2) Pembiasaan peringatan hari besar keagamaan; 3). Adanya upacara bendera setiap hari Senin dengan memakai seragam yang telah ditentukan; 4). Mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah; 5). Sebelum memulai pembelajaran siswa diberi waktu selama 15 menit untuk membaca (pelaksanaan kegiatan literasi); 6). Menjalankan peraturan sekolah; 7). Adanya budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); 8). Memperingati hari besar nasional; 9). Membangun sosialisasi positif antar-peserta didik; 10). Membangun interaksi positif antar peserta didik dengan warga sekolah dan orang tua murid; 11). Adanya keunggulan minimal dalam satu (1) bidang, misalnya bidang pengetahuan atau lainnya.

3. Proses Penetapan Sekolah Rujukan

a. Pemilihan dan Penetapan Sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMP

Untuk memilih dan menetapkan sekolah rujukan, maka pemerintah terkait harus melaksanakan beberapa tahap berikut ini: 1). Melaksanakan desiminasi kepada Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota; 2). Menyiapkan kuesioner yang disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan untuk tahap seleksi; 3). Mengumpulkan informasi mengenai calon sekolah berdasarkan data pendukung, misalnya data hasil akreditasi, data dari Dapodikdasmen, data sekunder dari Direktorat PSMP dan data dari Dinas Pendidikan Kab/Kota; 4). Memberikan *feedback* ke sekolah; 5). Adanya analisis data hasil konfirmasi; 6). Menentukan nilai sekolah rujukan berdasarkan data yang didapatkan; 7). Menentukan sekolah rujukan atau calon sekolah rujukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan; 8). Memberikan laporan penetapan sekolah yang telah terpilih kepada Dinas terkait juga Sekolah.

b. Tahap Pengembangan Calon Sekolah Rujukan

Setelah calon sekolah rujukan ditetapkan, maka langkah selanjutnya yaitu: 1). Membentuk tim untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan yaitu Tim Pengembangan Sekolah Rujukan. 2). Melakukan evaluasi. 3). Membuat daftar pencapaian dan permasalahan mutu. 4). Merumuskan dan melaksanakan RKS dan RKAS berdasarkan hasil dari evaluasi untuk memenuhi SNP. 5). Mengadakan desiminasi mengenai program sekolah rujukan ke semua pihak sekolah. 6). Melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah rujukan, yaitu: a. Berusaha untuk meningkatkan akreditasi sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. b. Berusaha untuk meningkatkan ekosistem pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan. c. Berusaha untuk memajukan lingkungan pendidikan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan. d. Menyelenggarakan pendidikan karakter untuk memenuhi standar sebagai sekolah rujukan. e. Menjadi *central* keunggulan. 7). Adanya keterbukaan dalam menata seluruh sumber dana. 8). Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 9). Menentukan program selanjutnya untuk meningkatkan mutu sekolah rujukan.

4. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat

- a. Pemerintah dapat membantu pengembangan sekolah rujukan dalam bentuk: 1). Merumuskan langkah-langkah teknis. 2). Mengadakan seleksi dan menentukan sekolah sasaran. 3). Memberikan penjelasan kepada calon sekolah rujukan. 4). Menyalurkan dana dan bantuan yang di butuhkan. 5). Mengadakan penilaian untuk memberikan *feedback*.
- b. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dalam bentuk: 1). Menyeleksi atau membantu pemerintah setempat dalam tahapan seleksi. 2). Memberikan penjelasan kepada pihak sekolah. 3). Membantu dalam pendanaan dan teknis. 4). Melaksanakan penilaian untuk memberikan masukan.
- c. Orang tua siswa dan masyarakat juga mempunyai peran dalam pengembangan sekolah rujukan, yaitu: 1). Mendukung dalam proses penyusunan rencana sekolah ke depan. 2). Menyalurkan bantuan berupa dana. 3). Mengadakan pengawasan.

2.2.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah rujukan ada empat (4) langkah yang perlu dilakukan, yaitu: 1) menyusun perencanaan sekolah dalam bentuk RKS dan RKAS, 2) melaksanakan program kegiatan berdasarkan perencanaan, 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi, 4) menyusun kembali rencana perbaikan atau rencana tindak lanjut.

2.3 Standar Nasional Pendidikan

Sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013, 2013 tentang standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar nasional pendidikan (SNP) memiliki 8 standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan yaitu, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana dann standar penilaian pendidikan.

2.3.1 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. (Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013, 2013).

Menurut la Velle (2019) Di Inggris orang yang memilih karir sebagai pendidik merupakan sesuatu yang unik karena penerimaan dan peningkatan kualitas guru masih menjadi *issue* yang menarik untuk dibahas karena hal ini menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan negara. Menurut UNESCO (2015) faktor utama dalam penerimaan guru yaitu guru yang sudah terlatih dan berkualifikasi yang sesuai dengan ketentuan.

Kualitas seorang guru sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan, karena guru mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Meskipun pada zaman sekarang telah banyak perkembangan teknologi namun semua itu belum bisa mengganti peranan seorang guru, teknologi hanya sebagai media untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar (Nursyamsi, 2014). Untuk menjadi seorang pendidik yang professional dan berkualitas maka pendidik wajib memenuhi empat (4) kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial (Cut, Muniarti, & Nasir, 2017).

Menurut Darling-Hammond (dalam Higley et al., 2019) di Amerika guru yang hanya menempuh pendidikan pada kualifikasi S1 mereka sadar akan kekurangan mereka dalam kemampuan mengajar. Meskipun dalam penguasaan teori sangat baik namun mereka sadar kedepannya kompetensi pedagogik sangatlah penting dan dibutuhkan oleh guru. Oleh karena itu kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi terpenting yang perlu dikuasai oleh guru.

Selain itu menurut Mercer, Hennessy, & Warwick, (2019) kompetensi guru sangatlah penting dalam peningkatan proses pembelajaran, karena kualitas pendidik dilihat dari bagaimana ia menguasai kelas dan membuat siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran.

2.3.2 Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, taman baca, dan semua sarana

dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran (Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013, 2013).

Menurut Mulyasa (2003) sarana adalah perlengkapan yang secara langsung digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya proses pembelajaran seperti, ruang kelas, gedung, alat-alat pembelajaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, sarana yang tersedia dapat berperan dengan efektif dan efisien jika dipergunakan sesuai dengan fungsinya secara efektif dan efisien. Selain itu menurut Barnawi (2012) prasarana pendidikan adalah fasilitas dan perlengkapan yang secara tidak langsung ikut berperan dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu penunjang berjalannya pendidikan dengan optimal (Nasrudin & Maryadi, 2018).

Menurut Rika (2014) penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sangat penting karena jika fasilitas yang di butuhkan memadai maka siswa dapat menikmati proses pembelajaran dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang jalannya pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa “setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan” (*Undang-Undang No 20 Tahun 2003*).

Sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses belajar karena dapat membantu siswa dalam memahami setiap materi yang diberikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tetap dan sesuai dengan materi yang di ajarkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Artinya, permasalahan dalam proses belajar bukan hanya dihadapi oleh guru tetapi juga dari kelengkapan sarana dan prasarananya (Rika, 2014).

Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah ditentukan yaitu terdiri dari: 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium IPA, 4) ruang pimpinan, 5) ruang guru, 6) ruang tata usaha, 7) tempat beribadah, 8) ruang konseling, 9) ruang UKS, 10) ruang OSIS, 11) toilet, 12) gudang, 13) ruang sirkulasi, 14) tempat bermain/olahraga

(Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007). Dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan maka hal-hal yang dibutuhkan adalah: 1) perencanaan sarana dan prasarana, 2) pengadaan sarana dan prasarana dan 3) inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan (Kurniawan, 2017).

2.4 Mutu Pendidikan

Mutu dalam pendidikan dianggap sebagai patokan dalam meningkatkan kebutuhan dan proses untuk mengembangkan bakat peserta didik, dan pada saat yang bersamaan untuk memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh *stakeholder* yang membiayai proses atau output dari proses pendidikan (Fadli, 2017).

Pendidikan di Indonesia dikatakan bermutu jika telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang dijadikan patokan atau standar mutu suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi SNP bahwa SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu pendidikan dikatakan bermutu jika telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP) (Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013, 2013).

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mengembangkan karakter bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tujuan untuk membangun pendidikan secara nasional dan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh. (Baahrun, Murniati, 2017)

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah juga ikut harus ikut berpartisipasi. Usaha yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah baik sekolah negeri maupun swasta adalah mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan kompetensi guru melalui seminar, workshop, pelatihan dan lainnya secara berkelanjutan sehingga guru dapat berkembang menjadi guru yang profesional dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, dengan demikian peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2017).

Mutu adalah faktor penting dalam menjaga daya saing global. Untuk tetap sukses di dunia global, perusahaan ditekan untuk terus meningkatkan mutu produk atau layanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan, pendidikan ditekan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di pasar global dan bisa memberikan

keunggulan kompetitif pada pelanggan dengan mengidentifikasi, memenuhi dan juga melampaui tuntutan. Hal ini sesuai dengan *Total Quality Education (TQE)* yang dikemukakan oleh (Dahlgard, Kristensen & Kanji, 1995, 445): “Budaya pendidikan ditandai dengan peningkatan pelanggan melalui peningkatan berkelanjutan, dimana semua karyawan dan siswa ikut berpartisipasi”.(Sagnak, Ada, Kazancoglu, & Tayaksi, 2017)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan proses dalam meningkatkan kebutuhan dalam dunia pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga karakter. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja tetapi pihak sekolah harus ikut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan-kegiatan agar guru dapat berkembang menjadi guru profesional sehingga guru dapat meningkatkan mutu belajar, dengan demikian maka peningkatan mutu pendidikan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang baik.

3. Metode Penelitian

3.8 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat.

Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat.

3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara. Alasan dipilihnya sekolah ini karena SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai sekolah menengah yang telah mengaplikasikan indikator-indikator sekolah rujukan. Dengan kondisi tersebut, maka diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menemukan data serta informasi yang dibutuhkan mengenai

pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus 2019.

3.10 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Karena peneliti yang merancang dan melakukan penelitian, menganalisis data hingga menyimpulkan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipatif karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sekolah rujukan. Selanjutnya peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang bertujuan agar saat wawancara nanti dapat berjalan secara alami dan peneliti bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari narasumber terkait dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan.

3.11 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk memperoleh jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengenai implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat.

Sedangkan data sekunder penelitian ini yaitu data yang didapatkan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat.

3.12 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik untuk mengumpulkan data terkait dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dimana peneliti melakukan proses pengamatan mengenai implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah imbas. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari tim inti pelaksana kebijakan sekolah rujukan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan beberapa guru juga wawancara kepada sekolah imbas. Studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen yang terkait

dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah imbas.

3.13 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Huberman & Miles (1994) yaitu ada empat tahap dalam analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

3.14 Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menghindari adanya data yang tidak akurat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sumber dan triangulasi waktu untuk memeriksa keabsahan data yang didapatkan dari narasumber dan dokumen-dokumen yang mendukung.

4. Hasil Penelitian

4.1 Implementasi Kebijakan Sekolah Rujukan

Dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sekolah Rujukan dengan tujuan agar dengan adanya sekolah rujukan ini maka pemerataan mutu pendidikan di Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Dalam mengimplementasikan sekolah rujukan, tentunya mempunyai hasil yang berbeda-beda pada setiap sekolah. Hal ini juga dikemukakan oleh Wakasek SMP Negeri 1 Taliabu Barat tentang implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat berikut ini.

“Proses implementasi sekolah rujukan ini awalnya ada penilaian khusus melalui pembagian kuesioner dan dilaksanakan hanya dalam beberapa bulan. Persyaratan utamanya adalah sekolah harus memenuhi 8 SNP, telah terakreditasi A.” (WK/17-07-19)

Selain itu wakil kepala sekolah juga menjelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

“jadi implementasi sekolah rujukan di sekolah ini kami jalankan sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh pemerintah, hanya saja kami memiliki kendala pada pendidik dan juga sarana dan prasarannya. Misalnya guru masih belum mahir dalam menguasai kurikulum 2013, maka kami mengadakan pelatihan di sekolah agar guru-guru yang sudah menguasai K13 dapat membantu guru-guru yang belum menguasai hal itu. Kalau sarana dan prasarannya awalnya kami tidak memiliki

proyektor maka kami harus menyediakan proyektor, dll. Namun untuk pelaksanaan implementasi sekolah rujukan, Alhamdulillah dapat kami jalankan sesuai dengan arahan yang telah diberikan....” (WK/17-07-2019)

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Wakasek diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan ini sekolah telah menjalankan atau melaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah diberikan, namun dalam awal pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yaitu kendala pada pendidik dan juga sarana dan prasarannya.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan Wakasek mengenai implementasi sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat bahwa implementasinya disesuaikan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah. Maka pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dari Kurikulum seperti berikut ini.

“Dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan ini, kami jalankan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, jadi setelah mendapatkan arahan tersebut kami rapat bersama dewan guru untuk pelaksanaan sekolah rujukan ini, meskipun kami masih mempunyai beberapa kendala...” (WK/K/17-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi sekolah rujukan SMP Negeri 1 Taliabu Barat sudah menjalankan sesuai dengan arahan yang diberikan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu pada kualitas pendidik dan juga sarana dan prasarana. Hal ini juga di jelaskan oleh Wakasarpras bahwa:

“implementasi kebijakan sekolah rujukan yang kami jalani ini sudah kami sesuaikan dengan apa yang kami dapatkan atau arahan yang diberikan oleh pemerintah. Saya juga akui bahwa dalam implementasi kebijakan ini, sekolah kami masih mempunyai kendala terkait pendidik dan sarana prasarana. Namun kami sudah berusaha untuk mengatasi hal itu agar sekolah kami dapat menjadi sekolah rujukan sesuai dengan yang diharapkan” (WK/SP/17-07-2019)

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sekolah rujukan, komite juga mempunyai peran penting. Salah satu peran komite yaitu memberitahukan kepada seluruh wali murid mengenai kebijakan sekolah rujukan ini. Pada hasil wawancara hal tersebut dibenarkan oleh pihak komite, bahwa:

“saya selaku ketua komite bertugas untuk memberi arahan dan juga pengertian kepada para wali murid mengenai adanya kebijakan sekolah rujukan ini. Saya mengadakan rapat bersama wali murid, lalu saya beritahukan bahwa SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini dipilih sebagai sekolah rujukan karena dianggap sudah memenuhi 8 SNP yang telah ditetapkan. Respon dari para wali murid mereka sangat bangga dengan SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini karena walaupun sekolahnya berada di kabupaten yang jauh dari kota namun kualitas pendidikannya sudah tidak diragukan lagi. Maka dari itu saya memberitahukan kepada para orang tua bahwa mereka harus terus membantu anak-anak untuk terus giat belajar” (K/17-07-2019)

Dari keseluruhan hasil wawancara, semua narasumber memiliki pendapat yang hampir sama mengenai implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini. Implementasi sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sudah dijalankan berdasarkan arahan dan pedoman-pedoman yang diberikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan sekolah rujukan. Namun, masih memiliki beberapa kendala yang harus di atasi yaitu kendala pada pendidik dan sarana dan prasarannya. Untuk meningkatkan dua standar tersebut maka sekolah melakukan berbagai upaya agar kualitas dari dua standar tersebut dapat maksimal atau dapat melampaui standar tersebut.

Pernyataan diatas juga di dukung oleh hasil observasi yang telah di lakukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat bahwa sekolah ini telah memiliki akreditasi dengan nilai A, mempunyai lingkungan sekolah yang nyaman, iklim sekolah yang nyaman dan menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini sesuai dengan panduan implementasi kebijakan sekolah rujukan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud 2016.

4.2 Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu syarat sekolah rujukan yaitu kualifikasi pendidiknya harus memenuhi pesyaratan yaitu minimal berkualifikasi S1. Hal ini juga dijelaskan oleh Wakasek dalam hasil wawancara mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, beliau menjelaskan bahwa:

“sumber daya manusia (SDM)nya harus memenuhi persyaratan, jadi tidak ada D1, D2, dan D3. Jadi rata-rata S1 dan S2, jadi sekolah ini juga sudah ada guru yang S2”. (WK/17-07-2019)

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan Pemendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, maka SMP Negeri 1

Taliabu Barat sudah memenuhi salah satu persyaratan sebagai sekolah rujukan karena telah mempunyai standar kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk kompetensi guru yang ada masih perlu untuk dikembangkan.

Untuk mengembangkan kompetensi pendidik agar lebih maksimal lagi, maka guru-guru bergabung dalam forum MGMP agar dapat saling membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mereka. Hal ini dibenarkan oleh Wakasek dalam hasil wawancara, yaitu:

“Guru-guru mengikuti kegiatan, saling menunjang antara satu dengan yang lain. Selain itu ada juga MGMP untuk setiap guru mata pelajaran agar mereka bisa saling *sharing* dan membantu jika ada kesulitan”. (WK/17-07-2019)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa guru-guru diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mereka melalui forum MGMP ini. Karena dalam MGMP guru-guru bisa saling *sharing* mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan bisa saling bertukar pendapat.

Selain adanya MGMP atau forum guru lainnya yang bertujuan agar seluruh guru saling membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mereka, sekolah juga menyediakan fasilitas-fasilitas dalam menunjang proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan guru bisa kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Hal ini juga dikemukakan oleh Kurikulum dalam hasil wawancara yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sebagai berikut.

“Sekolah memberikan fasilitas-fasilitas kepada guru agar dapat meningkatkan profesionalismenya. Fasilitas yang diberikan yaitu disediakan komputer dan juga laptop. Karena dengan menggunakan IT guru-guru sudah bisa memberikan pelajaran pada siswa dengan baik. Guru juga diminta untuk membuat PTK dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas”. (WK/K/17-07-2019)

Dengan disediakannya fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk proses pembelajaran hal ini juga membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya. Guru-guru dapat membuat media pembelajaran yang kreatif agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi di SMP Negeri 1 Taliabu Barat bahwa sekolah menyediakan fasilitas-fasilitas berupa laptop, lab, media-media belajar agar guru dalam memberikan pelajaran bisa cepat dipahami oleh siswa dan dengan adanya media-media pembelajaran guru bisa lebih kreatif lagi untuk menarik minat siswa dalam belajar.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru, sekolah juga mengikutsertakan guru-guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Hal ini juga di kemukakan oleh Wakasek Sarana dan Prasarana dalam hasil wawancara yaitu:

“Pertama guru dikirim untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, misalnya dari LPMP”. (WK/SP/17-07-2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru maka sekolah sering menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar guru-guru bisa terus meningkatkan kualitas mereka.

Selain itu, pernyataan dari Ketua Humas dalam hasil wawancara juga menyatakan bahwa:

“iya ada, jelas itu harus ada. Semua itu kan sekolah rujukan itu kan sudah teruji dengan baik apabila ada peningkatan kualitas dan mutu dari tenaga pengajarnya dalam hal ini apabila ada pelatihan ditingkat kabupaten, provinsi, biasanya guru2 matpel diutus kesana terutama yang berkaitan dengan kurikulum, apalagi sekarang kurikulum baru ini kurikulum 2013 ini sering bapak ibu guru dikirim ke Manado, Ternate, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Tentu saja yang pertama itu dia harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyajikan materi di kelas, dalam hal ini tentu saja dia harus mempersiapkan program pengajaran, terus memberikan motivasi yang baik pada anak-anak agar tetap bersemangat dalam belajar dan sebagainya”. (H/17-07-2019)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru-gurunya melalui adanya pelatihan-pelatihan, workshop dan juga MGMP sebagai sarana untuk guru setiap mata pelajaran agar saling membantu satu sama lain dan dapat terbentuknya guru-guru yang berkualitas.

Hasil dari adanya pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi pendidik di SMP Negeri 1 Taliabu Barat dapat dilihat dari:

1). Guru sudah bisa membuat buku guru (buku pedoman guru). 2). Guru sudah mampu membuat alat peraga sendiri. 3). Guru sudah mampu menyajikan model pembelajaran yang beragam. 4). Guru yang awalnya kaku dengan IT sekarang sudah bisa dengan mudah menggunakan IT sebagai salah satu hasilnya yaitu guru sudah bisa membuat e-raporting. Selain itu, hasil dari meningkatnya kompetensi guru juga berdampak pada kemampuan siswa karena guru sudah mampu menyajikan model pembelajaran yang beragam juga menggunakan berbagai media pembelajaran agar siswa dengan mudah memahami pembelajaran maka prestasi siswa juga meningkat.

Namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan kompetensi pendidik salah satunya yaitu ketersediaan dana untuk guru mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Pada tahun pertama diterapkan kebijakan sekolah rujukan, pemerintah memberikan dana sekolah rujukan dengan tujuan untuk pembangunan dan pengembangan kebutuhan sekolah agar lebih baik lagi. Jika dana tersebut sudah terpajai maka sekolah hanya mengandalkan dana bantuan sekolah (BOS) karena SMP Negeri 1 Taliabu Barat ini merupakan sekolah gratis.

4.3 Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam isi kebijakan sekolah rujukan salah satu syaratnya yaitu terpenuhinya fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini juga dijelaskan oleh Wakasek dalam hasil penelitian, bahwa:

“dengan adanya bantuan dari pusat, maka kami membuat fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti taman belajar, taman baca, membuat perlengkapan pembelajaran agar anak-anak semakin betah”. (WK/17-07-2019)

Selain fasilitas seperti yang dijelaskan oleh Wakasek diatas, fasilitas-fasilitas lain juga disediakan untuk menunjang proses pembelajaran agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan efektif dan efisien. Hal ini dijelaskan oleh Wakasek Sarana dan Prasarana dalam wawancara bahwa:

“disediakan fasilitas, seperti lab, perpustakaan, sarpras olahraga. Sarpras dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan juga mempunyai peran lain yaitu, peranya melihat bahwa kalau ada sarpras yang sudah tidak sesuai maka akan diganti, rusak kan ada rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, nah langsung kita laporkan ke kepala sekolah, misalnya kursi atau meja”. (WK/SP/17-07-2019)

Dalam peningkatan sarana dan prasarana Humas juga mempunyai peran penting, salah satunya yaitu:

“Yang kedua peningkatan sarpras belajar dalam hal ini terutama lingkungan sekolah, hal ini harus menunjang ke arah situ, ke arah sekolah rujukan. Sehingga dibuatlah taman-taman didepan sana itu selaku untuk tempat anak-anak belajar, membaca, dan sebagainya.” (H/17-07-2019)

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang proses pembelajaran yang maksimal dan sebagai sekolah rujukan maka sekolah harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran dan juga seluruh kebutuhan siswa di lingkungan sekolah agar siswa maupun guru dapat memperoleh pembelajaran yang lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari semua narasumber bahwa sekolah menyediakan taman baca untuk menunjang kebutuhan siswa, sekolah menyediakan berbagai media pembelajaran, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang tergolong rusak ringan dan mengganti fasilitas-fasilitas yang tidak layak pakai dengan yang baru.

Kendala dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah ini juga sama dengan kendala yang ada di peningkatan pendidik yaitu ketersediaan dana. Karena SMP Negeri 1 Taliabu Barat merupakan sekolah gratis maka dana yang digunakan berasal dari dana BOS.

5. Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman kebijakan sekolah rujukan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yaitu kualitas pendidik dan penyediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu sekolah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidik juga kualitas sarana dan prasarana, karena kedua hal ini termasuk komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan adanya sekolah rujukan ini diharapkan agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik lagi hingga ke daerah-daerah terpencil yang dulunya susah dijangkau dan jarang dijumpai lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan sekolah rujukan yaitu, untuk membantu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan SNP yang telah di tentukan

di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu adanya sekolah rujukan diharapkan mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan dari sekolah rujukan ke sekolah yang ada disekitarnya (Kemendikbud, 2016).

Selain dengan adanya kebijakan sekolah rujukan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas pendidik juga salah satu hal yang penting yang perlu di tingkatkan karena tidak dipungkiri bahwa pendidik juga termasuk dalam komponen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi (2014) bahwa kualitas seorang guru sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan, karena guru mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Meskipun pada zaman sekarang telah banyak perkembangan teknologi namun semua itu belum bisa mengganti peranan seorang guru, teknologi hanya sebagai media untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, SMP Negeri 1 Taliabu Barat terus mendorong guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan profesionalisme guru. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan mereka membenarkan bahwa setiap ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi maka guru-guru wajib untuk berpartisipasi agar terus meningkatkan kualitas mereka.

Untuk meningkatkan kualitas suatu profesi khususnya profesi keguruan maka dapat dilaksanakan dalam berbagai cara ataupun metode, misalnya guru mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, *in house training* (IHT), mengikuti pelatihan berjenjang, dan mengikuti kursus maupun pelatihan yang dilaksanakan di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Saud Syaifudin (2013) ada beberapa program alternatif untuk meningkatkan profesionalisme guru, antara lain: 1). Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru. 2). Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi. 3). Program Supervisi Pendidikan. 4). Program Pemberdayaan MGMP. 5). Simposium Guru. 6). Melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas).

Dari pendapat di atas sesuai dengan hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis bahwa untuk terus meningkatkan kualitas kompetensi pendidik maka sekolah memberikan pelatihan-pelatihan juga adanya MGMP untuk guru-guru saling membantu dalam menghadapi kesulitan selama proses pembelajaran.

Selain faktor dari kualitas pendidik, kualitas sarana dan prasarana juga salah satu komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di SMP Negeri 1 Taliabu Barat sarana dan prasarana masih terus ditingkatkan agar guru maupun siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rika (2014) bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sangat penting karena jika fasilitas yang di butuhkan memadai maka siswa dapat menikmati proses pembelajaran dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang jalannya pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa “setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan” (*Undang-Undang No 20 Tahun 2003*).

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian di SMP Negeri 1 Taliabu Barat mengenai kebijakan sekolah rujukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi kebijakan sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat telah dijalankan selama 2 tahun dan di sesuaikan dengan Panduan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Rujukan Pada Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2016). Proses implementasi sekolah rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat yaitu adanya penilaian khusus melalui pembagian kuesioner dan dilaksanakan selama beberapa bulan dan akhirnya ditetapkan sebagai sekolah rujukan karena syarat utamanya yaitu telah terakreditasi A.
- b. Untuk meningkatkan kualitas pendidik maka sekolah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik di SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan yaitu, workshop, MGMP, dll. Hasil dari

pelatihan-pelatihan maupun workshop dan sebagainya yaitu: 1). Guru sudah bisa membuat buku guru (buku pedoman guru). 2). Guru sudah mampu membuat alat peraga sendiri. 3). Guru sudah mampu menyajikan model pembelajaran yang beragam. 4). Guru yang awalnya kaku dengan IT sekarang sudah bisa dengan mudah menggunakan IT sebagai salah satu hasilnya yaitu guru sudah bisa membuat e-reporting.

- c. Untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana maka sekolah menggunakan dana yang telah diberikan oleh Kemendikbud yaitu dana sekolah rujukan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti penyediaan taman baca agar siswa dapat membaca dengan nyaman, penyediaan alat-alat bantu dalam proses pembelajaran agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan efektif dan efisien.

6.1 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan saran terkait dengan implementasi kebijakan sekolah rujukan. Sebagai sekolah rujukan seharusnya sekolah lebih mempersiapkan komponen-komponen yang mendukung dalam implementasi sekolah rujukan agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Sebagai sekolah rujukan, sekolah harus terus meningkatkan semua unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam implementasi sekolah rujukan seperti pendidik dan sarana dan prasarana. Karena permasalahan yang paling menonjol di sekolah ini yaitu kedua unsur tadi, maka sekolah harus terus meningkatkan kedua unsur tersebut agar lebih baik lagi yang nantinya akan berpengaruh pada mutu pendidikan di sekolah tersebut. Namun bukan berarti sekolah hanya fokus pada kedua standar tersebut tapi sekolah juga harus terus meningkatkan semua standard an komponen yang menjadi hal penting dalam sekolah rujukan.

Rujukan

- Baahrun, Murniati, R. S. P. (2017). Strategi peningkatan mutu pendidikan pada sma negeri 3 meulaboh kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 161–166.
- Cut, F., Muniarti, A., & Nasir, U. (2017). *KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI MTs MUHAMMADIYAH BANDA ACEH*. 88–95.
- Direktorat Jenderal Pendidikan, D. dan M. (n.d.). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik-Gadjah Mada University Press*.
- Ekawati, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Rujukan di SD Negeri 1 Bantul. (6), 67–72.
- Fadli, M. (2017). *Manajemen Peningkatan Mutu*. 1(02), 26.
- Higley, B. P., Heesacker, M., & Brenneman, K. N. (2019). H2O-Centered Education: Helping Education Excellence Flow More Freely. *Journal of Education*. <https://doi.org/10.1177/0022057419864527>
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Rujukan Pada Sekolah Menengah Pertama*.
- Kurniawan, N. (2017). Pengaruh standart sarana dan prasarana terhadap efektifitas pembelajaran di Tk Al-Firdaus. *Jurnal Warna: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 2(2), 14–26.
- la Velle, L. (2019). Motivation and provision in teacher education: context, culture and capacity. *Journal of Education for Teaching*, 45(5), 491–493. <https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1675356>
- Leonard. (2015). *KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA : ANALISIS DAMPAK RENDAHNYA KUALITAS SDM GURU DAN*. 5(3), 192–201.
- Mercer, N., Hennessy, S., & Warwick, P. (2019). Dialogue, thinking together and digital technology in the classroom: Some educational implications of a continuing line of inquiry. *International Journal of Educational Research*, 97(March), 187–199. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.007>
- Miles, Ma. B., & Huberman, M. A. (1994). Data Management and Analysis Method. In *Handbook of Qualitative Research*.

- Nasrudin, & Maryadi. (2018). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran di SD. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 15–23.
- Nasrullah, M. (2015). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Universitas Negeri Makassar*. 5(1), 53–63.
- Nursyamsi. (2014). *Pengembangan Kepribadian Guru*. 32–41.
- Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. *The World Economy*, 30(11), 1662–1681. <https://doi.org/10.1161/01.STR.32.1.139>
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. (n.d.). 3(September).
- Ramdhani, A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. (February).
- Rika, M. (2014). *PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 5 BUKITTINGGI*. 2, 636–648.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sagnak, M., Ada, N., Kazancoglu, Y., & Tayaksi, C. (2017). Quality function deployment application for improving quality of education in business schools. *Journal of Education for Business*, 92(5), 230–237. <https://doi.org/10.1080/08832323.2017.1339661>
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2017). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam Oktober*, 6(2), 1978–306.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, pp. 283–393. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003. (2003). (Mm), 1–18.
- Wayan, N., & Purna, E. (2017). *Meningkatkan Kualitas Guru Untuk Pendidikan yang Lebih Baik*. (March).
- Yudi, A. A. (2012). Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau Dari Segi Sarana Dan Prasarana (Sarana Dan Prasarana PPLP). *Jurnal Cerdas Sifa*, 1(1), 1–9.

Lampiran

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Aspek yang dikaji	Indikator	Sumber data
1	Implementasi kebijakan sekolah rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan tujuan kebijakan 2. Sumber daya kebijakan 3. Komunikasi antar organisasi terkait 4. Karakteristik pelaksana 5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik 6. Sikap pelaksana 	Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Pendidik yang terbentuk dalam tim inti pelaksana kebijakan sekolah rujukan
2	Cara pengimbasan standar kompetensi lulusan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah imbas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengimbasan standar kompetensi lulusan di sekolah imbas 2. Pengimbasan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah imbas 	Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Pendidik yang terbentuk dalam tim inti pelaksana kebijakan sekolah rujukan
3	Dampak adanya sekolah rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak setelah diselenggarakan sekolah rujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah imbas 	Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Pendidik di sekolah imbas

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah Pelaksana Kebijakan Sekolah
Rujukan di**

SMP Negeri 1 Taliabu Barat

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan sekolah rujukan?
2. Kapan kebijakan sekolah rujukan di selenggarakan?
3. Apa tujuan dari sekolah rujukan?
4. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya sekolah rujukan?
5. Berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah rujukan?
6. Berapa lama waktu pelaksanaan sekolah rujukan?
7. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kebijakan sekolah rujukan?
8. Apa saja program dari sekolah rujukan?
9. Bagaimana proses penyeleksian dari kebijakan sekolah rujukan?
10. Apa kriteria dari kebijakan sekolah rujukan?
11. Bagaimana peran lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
12. Bagaimana peran lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
13. Bagaimana peran politik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
14. Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
15. Bagaimana cara pengimbasan standar kompetensi lulusan ke sekolah imbas?
16. Bagaimana cara pengimbasan standar pendidik dan tenaga kependidikan ke sekolah imbas?

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Wakil Kepala Sekolah Pelaksana Kebijakan Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan sekolah rujukan?
2. Kapan kebijakan sekolah rujukan di selenggarakan?
3. Apa tujuan dari sekolah rujukan?
4. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya sekolah rujukan?
5. Berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah rujukan?
6. Berapa lama waktu pelaksanaan sekolah rujukan?
7. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kebijakan sekolah rujukan?
8. Apa saja program dari sekolah rujukan?
9. Bagaimana proses penyeleksian dari kebijakan sekolah rujukan?
10. Apa kriteria dari kebijakan sekolah rujukan?
11. Bagaimana peran lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
12. Bagaimana peran lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
13. Bagaimana peran politik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
14. Bagaimana peran Wakil Kepala Sekolah dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
15. Bagaimana cara pengimbasan standar kompetensi lulusan ke sekolah imbas?
16. Bagaimana cara pengimbasan standar pendidik dan tenaga kependidikan ke sekolah imbas?

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Pendidik Pelaksana Kebijakan Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan sekolah rujukan?
2. Kapan kebijakan sekolah rujukan di selenggarakan?
3. Apa tujuan dari sekolah rujukan?
4. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya sekolah rujukan?
5. Berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah rujukan?
6. Berapa lama waktu pelaksanaan sekolah rujukan?
7. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kebijakan sekolah rujukan?
8. Apa saja program dari sekolah rujukan?
9. Bagaimana proses penyeleksian dari kebijakan sekolah rujukan?
10. Apa kriteria dari kebijakan sekolah rujukan?
11. Bagaimana peran lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
12. Bagaimana peran lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
13. Bagaimana peran politik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
14. Bagaimana peran pendidik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
15. Bagaimana cara pengimbasan standar kompetensi lulusan ke sekolah imbas?
16. Bagaimana cara pengimbasan standar pendidik dan tenaga kependidikan ke sekolah imbas?

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah di Sekolah Imbas

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan sekolah rujukan?
2. Kapan kebijakan sekolah rujukan di selenggarakan?
3. Apa tujuan dari sekolah rujukan?
4. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya sekolah rujukan?
5. Berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah rujukan?
6. Berapa lama waktu pelaksanaan sekolah rujukan?
7. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kebijakan sekolah rujukan?
8. Apa saja program dari sekolah rujukan?
9. Bagaimana proses penyeleksian dari kebijakan sekolah rujukan?
10. Apa kriteria dari kebijakan sekolah rujukan?
11. Bagaimana peran lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
12. Bagaimana peran lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
13. Bagaimana peran politik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
14. Bagaimana peran pendidik dalam implementasi kebijakan sekolah rujukan?
15. Bagaimana cara pengimbasan standar kompetensi lulusan ke sekolah imbas?
16. Bagaimana cara pengimbasan standar pendidik dan tenaga kependidikan ke sekolah imbas?
17. Apa dampak setelah diselenggarakan kebijakan sekolah rujukan?